



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2011 - 2016

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUTAI BARATTAHUN 2011 - 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
9. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
10. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
12. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
13. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD;
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2016;
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2016;
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 31 Desember 2013.


BUPATI KUTAI BARAT,



ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 31 Desember 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**


AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 33.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2011 - 2016**

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
I	PENDIDIKAN				
1.1	Meningkatnya akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang bermutu dan Terjangkau	Angka Melek Huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk (usia di atas 15 tahun) yang bisa membaca dan menulis pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100 \%$	BPS	
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani	BPS	
		Angka Pendidikan yang Ditamatkan	$\frac{\text{jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan } h \text{ pada tahun } t}{\text{total jumlah penduduk pada tahun } t} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/MI}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTS}}{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA, SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Angka Kelulusan (AK) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah murid SD/MI yang lulus}}{\text{Jumlah murid SD/MI pada tingkatan tertinggi}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah murid SMP/MTs yang lulus}}{\text{Jumlah murid SMP/MTs pada tingkatan tertinggi}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Angka Kelulusan (AK) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah murid SMA/SMK/MA yang lulus}}{\text{Jumlah murid SMA/SMK/MA pada tingkatan tertinggi}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Angka Melanjutkan (AM) Dari SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah murid pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100 \%$	BPS	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah murid berusia 7 – 12 tahun pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100 \%$	BPS	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah murid pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100 \%$	BPS	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah murid berusia 13 – 15 tahun pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100 \%$	BPS	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah murid pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100 \%$	BPS	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah murid berusia 16 – 18 tahun pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100 \%$	BPS	
		Persentase bangunan SD/MI dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Persentase bangunan SMP/MTs dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Persentase bangunan SMA/MA dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMA/MA kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMA/MA}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Persentase bangunan SMA/SMK dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMK kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMK}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Rasio Guru SD/MI	$\frac{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SD/MI}}{\text{Jumlah murid pada jenjang pendidikan SD/MI}}$	Dinas Pendidikan	
		Rasio Guru SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs}}{\text{Jumlah murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs}}$	Dinas Pendidikan	
		Rasio Guru SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah murid pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA}}$	Dinas Pendidikan	
		Guru yang memenuhi Kualifikasi S1	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1}}{\text{Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
		Guru yang telah bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah guru yang telah lulus sertifikasi}}{\text{Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	
II	KESEHATAN				
2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite.	BPS	
		Angka Kematian Kasar Per 1.000 Penduduk	$\frac{\text{Jumlah kematian pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu}} \times 1000$	Dinas Kesehatan	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
		Angka kematian bayi (AKB)	$\frac{\text{Banyaknya kematian bayi selama tahun tertentu}}{\text{Banyaknya kelahiran hidup}} \times 1000$	Dinas Kesehatan	
		Angka Kelangusngan Hidup Bayi (AKHB)	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu}} \times 1000$	Dinas Kesehatan	
		Angka Kematian balita (AKABA)	$\frac{\text{Banyaknya kematian balita pada usia kurang dari 5 tahun}}{\text{Banyaknya balita}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan	
		Angka harapan hidup pada saat lahir	1-AKB	Dinas Kesehatan	
		Angka Kematian Ibu (AKI)	$\frac{\text{Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan	
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin di satu wilayah pada kurun waktu tertentu, yang persalinannya memperoleh pertolongan dari tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan}}{\text{jumlah ibu bersalin pada suatu wilayah dalam kurun waktu yg sama}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	
		Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di sautu wilayah kerja pada waktu yang sama}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	
		Cakupan kampung/Kelurahan Universal Child Imunisation(UCI)	$\frac{\text{Jumlah kampung/kelurahan UCI}}{\text{jumlah kampung/kelurahan}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	
		Cakupan Kampung Siaga Aktif	$\frac{\text{Jumlah seluruh kampung siaga yang aktif}}{\text{jumlah kampung siaga yang dibentuk}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	
		Cakupan Kampung/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	$\frac{\text{Jumlah KLB di Kampung/ Kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu}}{\text{jumlah KLB di Kampung/Kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Kampung yang telah memiliki Pustu	$\frac{\text{Jumlah seluruh kampung yang memiliki Pustu}}{\text{jumlah seluruh kampung yang ada}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%)	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di Sarana Kesehatan Strata 1}}{\text{jumlah seluruh masyarakat miskin}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	
		Rasio dokter	$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan	
		Rasio dokter spesialis	$\frac{\text{Jumlah dokter spesialis}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
		Rasio bidan	$\frac{\text{Jumlah bidan}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan	
		Rasio perawat	$\frac{\text{Jumlah perawat}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan	
		Angka Kesakitan malaria	$\frac{\text{Jumlah kasus baru malaria}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan	
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA +	$\frac{\text{Jumlah pasien baru TB BTA + yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama setahun}}{\text{jumlah perkiraan pasien baru TB BTA + dalam satu wilayah dalam waktu setahun}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	
		Angka kesembuhan penderita TBC BTA + (CDR/Cure Rate)	$\frac{\text{Banyaknya kasus TBC BTA + baru yang tercatat sembuh}}{\text{jumlah kasus TBC BTA + baru}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan	
		Angka kesakitan DBD	$\frac{\text{Jumlah kasus baru DBD}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan	
		Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di suatu wilayah dalam waktu satu tahun}}{\text{jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam satu tahun}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi TBC	$\frac{\text{Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan	
2.2	Meningkatnya kualitas/mutu pelayanan rumah sakit Harapan Insan Sendawar	BOR (Bed Occupancy Ratio/Angka Penggunaan Tempat Tidur)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{jumlah tempat tidur} \times \text{jumlah hari dalam satu periode}} \times 100 \%$	RSUD HIS	
		ALOS (Average Length Stay/Rata-Rata Lamanya Pasien Dirawat)	$\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{jumlah pasien keluar (hidup atau mati)}} \times 100 \%$	RSUD HIS	
		NDR (Net Death Rate)	$\frac{\text{Jumlah pasien meninggal} > 48 \text{ jam}}{\text{jumlah pasien keluar (hidup atau mati)}} \times 100\%$	RSUD HIS	
		Jumlah komplain masyarakat tentang pengelolaan kesehatan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah komplain masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah komplain masyarakat}} \times 100\%$	RSUD HIS	
III	PEKERJAAN UMUM				
3.1.	Meningkatnya akses darat dari dan ke wilayah Kutai Barat serta antar kecamatan dalam wilayah Kutai Barat	Jumlah Kampung Belum Dapat Dilalui Dengan Jalur Darat	Banyaknya kampung yang tidak atau belum dapat dilalui melalui jalur darat	DPU	
		Persentase jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Keseluruhan panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Keseluruhan panjang jalan}} \times 100 \%$	DPU	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Keseluruhan panjang jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Keseluruhan panjang jembatan}} \times 100 \%$	DPU	
		Panjang Jalan yang terbangun	Keseluruhan panjang jalan baru yang dibangun	DPU	
		Panjang jalan yang diperbaiki	Keseluruhan panjang jalan yang diperbaiki dalam satu tahun	DPU	
3.2.	Meningkatnya layanan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Keseluruhan panjang irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Keseluruhan panjang irigasi}} \times 100 \%$	DPU	
		Rasio panjang irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100\%$	DPU	
IV	PERUMAHAN				
4.1	Terciptanya lingkungan perumahan yang sehat	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (KK)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	DPU	
		Jumlah Kampung Yang Belum Memiliki Air Bersih	Cukup jelas	DPU	
		Tingkat cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik (KK) (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang dialiri listrik}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	DPU	
		Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh (LKP)	$\frac{\text{Luas lingkungan pemukiman kumuh}}{\text{luas wilayah}} \times 100 \%$	DPU	
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah berakses sanitasi}}{\text{jumlah rumah tinggal}} \times 100 \%$	DPU	
		Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah seluruh rumah di Pemda ybs}} \times 100 \%$	DPU	
V	PENATAAN RUANG				
5.1	Terkendalinya pemanfaatan ruang wilayah	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$	DPU	
		Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan (%)	$\frac{\text{Luas bangunan Ber – IMB}}{\text{jumlah bangunan seluruhnya}}$	DPU/BP2T	
		Jumlah wilayah banjir (kecamatan)	$\frac{\text{Jumlah wilayah banjir}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100 \%$	DPU/Bappeda	
		Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100 \%$	DPU/Bappeda	
VI	PERHUBUNGAN				
6.1	Meningkatnya arus orang dan	<i>Jumlah Arus Penumpang Angkutan</i>		Dishubkominfo	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET	
	barang ke dan dari wilayah Kutai Barat	<i>Umum:</i>				
		Laut/Sungai (Orang)	Jumlah penumpang masuk dan keluar yang terangkut melalui sungai dalam 1 tahun	Dishubkominfo		
		Darat (Orang)	Jumlah penumpang masuk dan keluar yang terangkut melalui darat dalam 1 tahun	Dishubkominfo		
		Udara (Orang)	Jumlah penumpang masuk dan keluar yang terangkut melalui udara dalam 1 tahun	Dishubkominfo		
		<i>Jumlah Barang Yang Terangkut Melalui Angkutan Umum:</i>			Dishubkominfo	
		Laut/Sungai (Ton)	Jumlah barang masuk dan keluar yang terangkut melalui sungai dalam 1 tahun	Dishubkominfo		
		Darat (Ton)	Jumlah barang masuk dan keluar yang terangkut melalui darat dalam 1 tahun	Dishubkominfo		
		Udara (Ton)	Jumlah barang masuk dan keluar yang terangkut melalui udara dalam 1 tahun	Dishubkominfo		
VII	KOMUNIKASI DAN INFORMASI					
7.1	Meningkatnya cakupan pelayanan telekomunikasi dan informasi	Persentase wilayah yang telah bisa diakses melalui telepon	$\frac{\text{Jumlah kampung yang bisa mengakses layanan telepon}}{\text{jumlah kampung seluruhnya}} \times 100 \%$	Dishubkominfo		
		Jumlah visitor <i>Website</i> Pemda	Jumlah visitor yang mengakses Website resmi Pemda selama setahun	Bappeda		
		Persentase telekomunikasi Kecamatan yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Telekomunikasi Kecamatan yang masih berfungsi dengan baik}}{\text{jumlah Kecamatan}} \times 100 \%$	Bagian Perlengkapan dan Aset (Telkomda)		
VIII	LINGKUNGAN HIDUP					
8.1	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan - lingkungan hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang telah diawasi}}{\text{jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL}} \times 100 \%$	Badan LH		
		Persentase perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup yang telah memiliki AMDAL	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup yang telah memiliki AMDAL}}{\text{jumlah perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup}} \times 100 \%$	Badan LH		
		Tingkat cakupan pengawasan dan penegakan peraturan terkait lingkungan hidup	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda}}{\text{jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100 \%$	Badan LH		

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
		Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan	$\frac{\text{Luas lahan yang telah ditetapkan dan dikonfirmasi status kerusakan lahan dan atau tanah utk produksi biomassa pada tahun berjalan}}{\text{Luas lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa}} \times 100 \%$	Badan LH	
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat tentang kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat tentang kerusakan lingkungan}} \times 100 \%$	Badan LH	
		Jumlah kasus pelanggaran terhadap Lingkungan	Cukup jelas	Badan LH	
IX	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
9.1	Tertibnya administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (> 17 tahun dan atau sudah /pernah menikah)}} \times 100 \%$	Disdukcapil	
		Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1.000$	Disdukcapil	
		Persentase bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi yang lahir pada tahun t dan telah memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah bayi yang lahir pada tahun yang sama}} \times 100 \%$	Disdukcapil	
		Rasio Pasangan Berakte Nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$	Disdukcapil	
		Rasio keluarga ber KK per satuan keluarga	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang memiliki KK}}{\text{jumlah keluarga}}$	Disdukcapil	
		Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/Belum	Disdukcapil	
		Ketersediaan database kependudukan berskala Provinsi	Ada/Tidak Ada	Disdukcapil	
X	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
10.1	Meningkatnya peran perempuan dalam pemerintahan, politik, sosial dan ekonomi	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	BKD	
		Keterwakilan Perempuan Di DPRD	$\frac{\text{Jumlah anggota DPRD perempuan}}{\text{Jumlah seluruh anggota DPRD}} \times 100 \%$	Sekretariat DPRD	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$	BPS	
		Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	$\frac{\text{Jumlah perempuan usia > 15 tahun melek huruf}}{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun}} \times 100 \%$	BPS	
XI	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				
11.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB;	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{jumlah seluruh PUS}} \times 100 \%$	Kantor PPKB	
		Cakupan PUS Yang Isterinya Di Bawah Usia 20 Tahun (%)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang usia istrinya < 20 tahun}}{\text{jumlah PUS yang usia istrinya 15 – 49 tahun}} \times 100 \%$	Kantor PPKB	
		% Wanita Menikah Usia 15-49 Yang Menggunakan Alat KB	$\frac{\text{Jumlah Wanita menikah usia 15 – 49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi}}{\text{jumlah wanita usia 15 – 49 tahun yang menikah}} \times 100 \%$	Kantor PPKB	
		Cakupan PUS Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB Mandiri (%)	$\frac{\text{Anggota UPPKS ber KB}}{\text{seluruh UPPKS peserta KB}} \times 100 \%$	Kantor PPKB	
		Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB (%)	$\frac{\text{Anggota BKB ber KB}}{\text{seluruh PUS anggota BKB}} \times 100 \%$	Kantor PPKB	
		Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Di Setiap Kampung/Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Kampung/Kelurahan}}{\text{jumlah PLKB/PKB}}$	Kantor PPKB	
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Di Setiap Desa/Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Kampung/Kelurahan}}{\text{Jumlah PPKBD}}$	Kantor PPKB	
		Cakupan Informasi Data Mikro Keluarga Setiap Desa (%)	$\frac{\text{Rekap data mikro keluarga kampung/kelurahan}}{\text{Jumlah Kampung/Kelurahan}} \times 100 \%$	Kantor PPKB	
XII	SOSIAL				
12.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi	Jumlah fakir miskin yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah fakir miskin yang ditangani}}{\text{Jumlah fakir miskin}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
	social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase anak terlantar yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar yang ditangani}}{\text{Jumlah anak terlantar}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	
		Persentase wanita rawan sosial yang dibina	$\frac{\text{Jumlah wanita rawan sosial yang ditangani}}{\text{Jumlah wanita rawan sosial}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	
		Persentase penyandang cacat yang dibina	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat yang ditangani}}{\text{Jumlah penyandang cacat}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	
		Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memperoleh bantuan modal usaha	$\frac{\text{Jumlah KUBE yang dibina}}{\text{Jumlah KUBE}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	
		Persentase anak putus sekolah yang dibina	$\frac{\text{Jumlah anak putus sekolah yang dibina}}{\text{Jumlah anak putus sekolah}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	
		Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan (KK)	$\frac{\text{Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang dibina}}{\text{Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT)}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	
		Jumlah panti asuhan	Cukup jelas	Dinas Sosial	
XIII	KETENAGAKERJAAN				
13.1	Meningkatnya kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas tenaga kerja -serta hubungan industrial yang terbina secara harmonis	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100 \%$	Disnaker	
		Rasio penduduk yang bekerja	$\frac{\text{Jumlah yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}}$		
		Persentase pekerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pekerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pekerja yang mendaftar}} \times 100 \%$	Disnaker	
		Angka pengangguran	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$		
		Tingkat Kecelakaan Kerja (Kasus)	Jumlah kasus terjadinya kecelakaan kerja	Disnaker	
		Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (Kasus)	Jumlah kasus terjadinya PHK	Disnaker	
		Jumlah perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam penyediaan bursa tenaga kerja	Cukup jelas		
XIV	INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL				

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
14.1	Meningkatnya investasi daerah dan perbaikan pelayanan mekanisme perijinan yang lebih cepat	Persentase kenaikan investasi	$\frac{\text{Nilai investasi tahun } n - \text{Nilai investasi tahun } n - 1}{\text{Nilai investasi tahun } n - 1} \times 100 \%$	BP2T	
		Nilai investasi - PMA (US \$) - PMDN (Rp)	Nilai investasi dalam setahun - PMA dalam US \$ - PMDN dalam rupiah (Rp)	BP2T	
		Rasio daya serap tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$	BP2T	
		Rata-rata lama proses perijinan	Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)	BP2T	
		Jumlah perijinan yang diterbitkan	Jumlah perijinan yang diterbitkan dalam setahun	BP2T	
XV	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
15.1	Meningkatnya rasa aman, toleransi, saling pengertian dan kebersamaan antar etnik dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat	Angka Kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Demo	Jumlah demo dalam setahun	Badan Kesbangpol	
		Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah pos kamling}}{\text{Jumlah kampung/kelurahan}}$	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	Badan Kesbangpol	
		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	$\frac{\text{Jumlah polisi Pamong Praja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	Kantor Pol PP	
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten / Kota	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah pelanggaran K3}} \times 100 \%$	Kantor Pol PP	
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%)	$\frac{\text{Jumlah mobil pemadam kebakaran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	BPBD	
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman (< 1 jam setelah pengaduan)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100 \%$	BPBD	
XVI	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,				

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
	ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				
16.1	Meningkatnya perekonomian untuk menuju masyarakat Kutai Barat yang sejahtera	Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{PDRB}(t+1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$	BPS	
		Laju Inflasi	$\frac{\text{Inf}(n+1) - \text{Inf}(n)}{\text{Inf}(n)} \times 100\%$	BPS	
		PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk pertengahan tahun}}$	BPS	
		Indeks Gini	$1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	BPS	
		Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	BPS	
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	(100 - angka kemiskinan)		
		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	$\frac{\text{Total pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$	BPS	
		Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	$\frac{\text{Total pengeluaran RT non pangan}}{\text{Total pengeluaran}}$	BPS	
		Produktivitas Total Daerah	$\frac{\text{Nilai tambah sektor ke-1}}{\text{jumlah angkatan kerja}}$	BPS	
16.2	Terselenggaranya pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel serta membaiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Persentase SKPD yang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menyampaikan LAKIP}}{\text{Jumlah semua SKPD}} \times 100\%$	Bappeda/Bagian Organisasi	
		Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	$\frac{\text{Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi}}{\text{Jumlah semua SKPD}} \times 100\%$	Inspektorat	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
	publik	Jumlah temuan pemeriksaan eksternal (kasus)	Jumlah kasus yang terindikasi pelanggaran dalam setahun yang dilakukan oleh auditor eksternal	Inspektorat	
		Persentase jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti (%)	$\frac{\text{Jumlah temuan auditor eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah semua temuan auditor eksternal}} \times 100 \%$	Inspektorat	
		Opini pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan	WTP/WDP/TW/Disclaimer	Bagian Keuangan	
16.3	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif yang didukung oleh Sistem pengendalian yang efektif dan efisien	Keselarasan Program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD dalam tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah program dalam RPJMD yang harus dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan}} \times 100 \%$	Bappeda	
		Persentase jumlah usulan Musrenbang yang terakomodir dalam APBD	$\frac{\text{Jumlah usulan melalui Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam APBD}}{\text{Jumlah usulan melalui Musrenbang Kecamatan}} \times 100 \%$	Bappeda	
XVI I	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG				
17.1	Berkembangnya peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan kampung serta kualitas aparatur pemerintahan kampung dalam mendukung kemajuan kampung	Persentase Kampung/Kelurahan yang tertib administrasi	$\frac{\text{Jumlah Kampung/Kelurahan yang tertib administrasi}}{\text{Jumlah semua Kampung/Kelurahan}} \times 100 \%$	Badan PMPK	
		Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah Kelompok binaan}}{\text{Jumlah LPM}}$	Badan PMPK	
		LPM berprestasi	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100 \%$	Badan PMPK	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah Kelompok PKK Binaan}}{\text{Jumlah PKK}}$	Badan PMPK	
		Jumlah LSM yang aktif	Jumlah LSM yang aktif minimal melaksanakan rapat sekali setahun	Badan Kesbangpol	
		Persentase Posyandu aktif	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Jumlah Posyandu}} \times 100 \%$	Diskes/TP-PKK	
		Persentase PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100 \%$	TP-PKK	
		Persentase Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai peruntukannya	$\frac{\text{Jumlah kampung yang bisa mempertanggungjawabkan ADK}}{\text{Jumlah kampung yang menerima ADK}} \times 100 \%$	Badan PMPK	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
		Persentase capaian keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	$\frac{\text{Jumlah Program PNPM yang telah dilaksanakan dengan baik pada tahun } n}{\text{Jumlah program PNPM yang direncanakan pada tahun } n} \times 100 \%$	Badan PMPK	
XVI II	KEARSIPAN				
18.1	Terciptanya tertib penyelenggaraan administrasi kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Tingkat Cakupan Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah mengelola arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$	Kantor Arsip & Perpustakaan	
		Rata-rata biaya pengelolaan arsip dalam setahun	Cukup Jelas	Kantor Arsip & Perpustakaan	
		Rata-rata jumlah jam yang dibutuhkan untuk mendapatkan dokumen atau informasi	Cukup Jelas	Kantor Arsip & Perpustakaan	
XIX	PERPUSTAKAAN				
19.1	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Cukup Jelas	Kantor Arsip & Perpustakaan	
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Cukup Jelas	Kantor Arsip & Perpustakaan	
		Jumlah judul buku terhimpun dalam katalog KDT ISBN dan ISMN	Cukup Jelas	Kantor Arsip & Perpustakaan	
XX	PERTANIAN				
20.1	Meningkatnya peranan sektor pertanian dalam peningkatan perekonomian di Kutai Barat	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)}}$	Disbuntanakan	
		Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	BPS	
		Kontribusi sub sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sub sektor pertanian (palawija)}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	BPS	
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sub sektor perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	BPS	
20.2	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, peternakan dan	Luas lahan produktif	Cukup jelas		
		Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani	Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani per tahun	Disbuntanakan	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
	Perikanan	Produktivitas tanaman pangan (kwintal/ha)	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/pangan utama lokal lainnya (Kwintal)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utamalokal lainnya (Ha)}}$	Disbuntanakan	
		- Padi sawah - Padi ladang - Palawija a. Jagung b. Kacang Hijau c. Kacang tanah d. Ubi Kayu e. Ubi Jalar		Disbuntanakan	
		Produktivitas tanaman perkebunan	$\frac{\text{Produksi tanaman perkebunan (ton)}}{\text{Luas areal tanaman perkebunan (Ha)}}$	Disbuntanakan	
		- Karet - Kelapa Sawit - Kakao		Disbuntanakan	
		Produksi daging ternak	Jumlah produksi daging ternak (ton) pertahun	Disbuntanakan	
		- Sapi - Kerbau - Babi - Ayam Pedaging - Ayam Buras - Itik			
	KETAHANAN PANGAN	Jumlah Penduduk yg bekerja sebagai Nelayan (jiwa)	Cukup jelas	Disbuntanakan	
		a. Budidaya			
		b. Tangkap			
		Jumlah Produksi Ikan (kg)	Jumlah Produksi Ikan per tahun (kg)	Disbuntanakan	
		a. Tangkap			
		b. Keramba			
		c. Kolam			
		Nilai Produksi (Rp)	Nilai Produksi Ikan Pertahun (Rp)	Disbuntanakan	
		a. Tangkap			
		b. Keramba			
	c. Kolam				
XXI	KETAHANAN PANGAN				

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
21.1	Meningkatnya ketahanan pangan dan stabilitas harga	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata - rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100 \%$	Kantor Ketapang & Penyuluhan	
		Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari) = $\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari}}{100} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}$ • Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) = $\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari}}{100} \times \text{Kandungan Protein} \times \text{BDD}$ <p>Ket: BDD = Bagian yang dapat dimakan</p>	Kantor Ketapang & Penyuluhan	
		Tingkat Penguatan Cadangan Pangan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan Kab/Kota}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$	Kantor Ketapang & Penyuluhan	
		Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga Dan Akses Pangan Di Daerah	<p>Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K)</p> $K = \sum_{i=1}^n K$ <p>Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3)</p> $K = \frac{\sum_{j=1}^3 \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right)}{3}$ <p>Keterangan :</p> <p>a) Ki = Ketersediaan informasi menurut i Dimana : i = 1 = Harga i = 2 = Pasokan i = 3 = Akses</p> <p>b) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu</p> <p>c) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu</p> <p>Target komoditas, target lokasi (kabupaten/kota, kecamatan/desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah.</p>	Kantor Ketapang & Penyuluhan	
		Jumlah lumbung pangan Kampung	Cukup jelas	Kantor Ketapang & Penyuluhan	
		Jumlah Kampung swasembada pangan	Cukup jelas		
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	$\% AKG = \frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka kecukupan gizi}} \times 100\%$	Kantor Ketapang	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
				& Penyuluhan	
		Tingkat Cakupan Penanganan Daerah Rawan Pangan	$\frac{\text{Daerah rawan pangan yang tertangani}}{\text{jumlah daerah rawan pangan}} \times 100\%$	Kantor Ketapang & Penyuluhan	
		Rasio PPL	$\frac{\text{Jumlah PPL}}{\text{jumlah kampung / kelurahan}}$	Kantor Ketapang & Penyuluhan	
XXII	KEHUTANAN				
22.1	Terkendalinya pengelolaan hutan dan hasil hutan lainnya	Jumlah Produksi Kayu Bulat	Jumlah produksi kayu bulat pertahun (m3)	Dinas Kehutanan	
		Jumlah Ijin PPH yang Dikendalikan	Cukup jelas	Dinas Kehutanan	
		Jumlah DBH SDA Kehutanan	Cukup jelas	Dinas Kehutanan	
		Luas Lahan yang Direhabilitasi (Ha)	Cukup jelas	Dinas Kehutanan	
		Jumlah Ijin Tambang Yang Melaksanakan Reklamasi	Cukup jelas	Dinas Kehutanan	
		Persentase lahan eks pertambangan yang telah direklamasi	$\frac{\text{Luas lahan eks pertambahan yang telah direklamasi}}{\text{Jumlah luas lahan eks pertambangan yang harus direklamasi}} \times 100 \%$	Dinas Kehutanan	
XXII I	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
23.1	Meningkatnya hasil produksi sumber daya mineral dan pertambangan	Jumlah usaha pertambangan	Cukup jelas	Dinas Pertambangan & Energi	
		Nilai produksi hasil tambang (Rp)	Cukup jelas	Dinas Pertambangan & Energi	
		Kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah	$\frac{\text{Nilai produksi sektor pertambangan pada tahun n}}{\text{Nilai PDRB tahun n}} \times 100 \%$	Dinas Pertambangan & Energi	
XXI V	KEBUDAYAAN				
24.1	Berkembangnya nilai budaya yang berorientasi pada pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal	Jumlah grup kesenian yang dibina	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	Disbudparpora	
		Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya (unit)	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Disbudparpora	
		Jumlah grup kesenian aktif	Jumlah grup atau kelompok kesenian yang secara berkala mengikuti pertunjukan, pameran, festival dan lomba	Disbudparpora	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
		Jumlah situs budaya	Bisa berupa jumlah lokasi, kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau, atau sedang direncanakan terkait dengan pengembangan budaya lokal	Disbudparpora	
		Rata-rata jumlah pengunjung museum per bulan	Cukup jelas	Disbudparpora	
		Frekuensi grup kesenian yang tampil di Taman Budaya Sendawar	Dapat berupa: pertunjukan, pameran, festival dan lomba	Disbudparpora	
XXV	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
25.1	Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah dan olahraga	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif}}{\text{Jumlah organisasi kepemudaan}} \times 100 \%$	Disbudparpora	
		Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah kegiatan (event) kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun.	Disbudparpora	
		Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi olahraga secara teratur	$\frac{\text{Jumlah induk olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur}}{\text{Jumlah induk olahraga yang terdaftar di suatu wilayah}} \times 100 \%$	Disbudparpora	
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang berprestasi}}{\text{Jumlah induk olahraga yang terdaftar di suatu wilayah}} \times 100 \%$	Disbudparpora	
XXV I	PARIWISATA				
26.1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung untuk tujuan wisata ke Kubar dalam setahun	Disbudparpora	
		Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung untuk tujuan wisata ke Kubar dalam setahun	Disbudparpora	
		Jumlah tempat wisata yang mendapatkan bantuan operasional	Cukup jelas	Disbudparpora	
		Rata-rata lama menginap di hotel/penginapan	$\frac{\text{Jumlah malam tamu menginap di hotel (hari)}}{\text{Jumlah tamu (orang)}}$	Disbudparpora	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	BPS	
XXV II	PERINDUSTRIAN				
27.1	Berkembangnya industri lokal yang berbasis pada pemanfaatan	Jumlah Perusahaan Kecil	Cukup jelas	Disperindakop & UKM	

NO.	URUSAN/SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SKPD PENANGGUNG-JAWAB	KET
	sumberdaya lokal				
XXV III	PERDAGANGAN				
28.1	Terkendalnya harga dan lancarnya distribusi barang	Jumlah Pasar Umum	Cukup jelas	Disperindakop & UKM	
		Pengawasan BBM di SPBU, APMS dan pengecer	Cukup jelas	Disperindakop & UKM/BPS	
XXI X	KOPERASI DAN UKM				
29.1	Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam perekonomian masyarakat lokal	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang aktif}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100 \%$	Disperindakop & UKM	
		Jumlah koperasi yang terbentuk dalam satu tahun	Cukup jelas	Disperindakop & UKM	
		Persentase keberhasilan pembinaan koperasi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang berhasil setelah mendapatkan pembinaan}}{\text{Jumlah koperasi yang dibina}} \times 100 \%$	Disperindakop & UKM	
		Jumlah UKM yang mendapatkan pembinaan	Cukup jelas	Disperindakop & UKM	
		Jumlah UKM Non BPR/LKMUUKM	Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM	Disperindakop & UKM	

ditetapkan di sendawar.
pada tanggal, 31 Desember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT



ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUTAI
BARAT TAHUN 2011 – 2016.

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...*nama SKPD*...) KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : /2014

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (...*nama SKPD*...) KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPALA (...*nama SKPD*...) KABUPATEN KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor ... Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2016, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...*nama SKPD*...);
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (...*nama SKPD*...)
- Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...*nama SKPD*...) KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...*nama SKPD*...) KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...*nama SKPD*...) Kabupaten Kutai Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...*nama SKPD*...) Kabupaten Kutai Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...*nama SKPD*...) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2016.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...*nama SKPD*...) Kabupaten Kutai Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan : Sendawar.
pada tanggal : 2014.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

KEPALA (...nama SKPD...)
Kabupaten Kutai Barat,

(Nama Lengkap dan Titel)
(Pangkat/Golongan)
(NIP.)

ditetapkan di sendawar.
pada tanggal, 31 Desember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT



ISMAIL THOMAS

**FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama SKPD...)
KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama SKPD :
 Tugas :
 Fungsi : 1.
 2.
 3. Dst

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD	PENJELASAN (RUMUS INDIKATOR KINERJA)	BIDANG URUSAN	UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU					
	1.	1.					
	2.	2.					
	3. Dst	3. Dst					

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

KEPALA (...nama SKPD...)
Kabupaten Kutai Barat,

(Nama Lengkap dan Titel)
(Pangkat/Golongan)
(NIP.)

ditetapkan di sendawar.
pada tanggal, 31 Desember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT



ISMAIL THOMAS